

**SKRIPSI**

**PELUANG PENDAFTARAN TENUN BALAI PANJANG SEBAGAI  
INDIKASI GEOGRAFIS DITINJAU DARI HUKUM INTERNASIONAL  
DAN HUKUM NASIONAL**

*Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum*

**OLEH :**

**ULVINA SAGITA**

**2010111029**

**PROGAM KEKHUSUSAN : HUKUM INTERNASIONAL (PK VI)**



**Pembimbing :**

**Dr. Delfiyanti, S.H., M.H**

**Dewi Enggriyeni, S.H., M.H**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG**

**2024**

# PELUANG PENDAFTARAN TENUN BALAI PANJANG SEBAGAI INDIKASI GEOGRAFIS DITINJAU DARI HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM NASIONAL

(Ulvina Sagita, 2010111029, Program Kekhususan Hukum Internasional (PK VI),  
Fakultas Hukum, Universitas Andalas, 84 halaman, 2024)

## ABSTRAK

Pendaftaran indikasi geografis merupakan cara untuk mendapatkan perlindungan hukum terhadap produk yang ingin dilindungi. Hukum internasional yang mengatur tentang pendaftaran indikasi geografis yaitu *The Lisbon Agreement for the Protection of Appellations of Origin and their International Registration* tahun 1958. Adanya penyempurnaan dari aturan ini melalui *Geneva Act* 2015. Kemudian pada tahun 1994 adanya aturan *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*. Hukum nasional tentang pendaftaran indikasi geografis terdapat pada Undang undang nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Permenkumham Nomor 10 tahun 2022 tentang indikasi geografis dan Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2022 tentang Kekayaan intelektual Komunal. Tenun Balai Panjang adalah salah satu produk yang dihasilkan oleh masyarakat geografis balai panjang kota payakumbuh yang dinilai memiliki potensi yang bagus untuk mendapatkan perlindungan hukum namun pada kenyataannya sampai saat sekarang kain tenun ini belum terdaftar sebagai indikasi geografis. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki dua pembahasan yaitu pertama, bagaimana pengaturan tentang indikasi geografis ditinjau dari hukum internasional dan nasional? Kedua, bagaimana peluang dan tantangan Tenun Balai Panjang untuk terdaftar sebagai indikasi geografis?. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan penelitian deskriptif yang dianalisis menggunakan analisis data yuridis kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan pengaturan internasional dengan nasional tentang pendaftaran indikasi geografis memiliki persamaan dalam persyaratan dokumen dan unsur unsur indikasi geografis. Tenun Balai Panjang ini memiliki potensi yang besar permohonan diterima. Karena telah memenuhi persyaratan, namun pemenuhan persyaratan tidak dilanjutkan dengan pemenuhan dan persiapan secara nyata untuk dokumen berkas yang menjadi syarat pendaftaran. Hal ini dikarenakan Fakta adanya beberapa tantangan yang dihadapi masyarakat dan pemerintah kota yaitu kurangnya pemahaman tentang indikasi geografis, belum adanya bukti nyata manfaat pendaftaran, proses pendaftaran yang cukup rumit dan tidak adanya kewajiban untuk melakukan pendaftaran.

**Kata Kunci : Pendaftaran, Indikasi Geografis, Hukum Internasional, Hukum Nasional, Tenun Balai Panjang.**

# **OPPORTUNITIES FOR REGISTRATION OF BALAI PANJANG WEAVING AS A GEOGRAPHICAL INDICATION IN TERMS OF INTERNATIONAL LAW AND NATIONAL LAW**

*(Ulvina Sagita, 2010111029, International Law Specialization Program (PK VI), Faculty of Law, University of Andalas, 84 pages, 2024)*

## **ABSTRACT**

*Geographical indication registration is a way to obtain legal protection for the product you want to protect. International law governing the registration of geographical indications is The Lisbon Agreement for the Protection of Appellations of Origin and their International Registration in 1958. There is a refinement of this rule through the Geneva Act 2015. Then in 1994, there was an Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights. National law on the registration of geographical indications is contained in Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications, Permenkumham Number 10 of 2022 concerning geographical indications and Government Regulation Number 56 of 2022 concerning Communal intellectual property. Tenun Balai Panjang is one of the products produced by the geographical community of Balai Panjang Payakumbuh city which is considered to have good potential for legal protection but in fact until now this woven fabric has not been registered as a geographical indication. Therefore, this research has two discussions, namely first, how the regulation of geographical indications is reviewed from international law. Therefore, this research has two discussions, namely first, how is the regulation of geographical indications in terms of international and national law? Second, what are the opportunities and challenges of Balai Panjang weaving to be registered as a geographical indication? This research uses normative juridical research methods with descriptive research analyzed using qualitative juridical data analysis. The results of the study concluded that international and national regulations on the registration of geographical indications have similarities in document requirements and elements of geographical indication elements. This Balai Panjang weaving has great potential for the application to be accepted. Because it has met the requirements, but the fulfillment of the requirements is not followed by the fulfillment and preparation in real terms for the file documents that are required for registration. This is due to the fact that there are several challenges faced by the community and the city government, namely the lack of understanding of geographical indications, there is no concrete evidence of the benefits of registration, the registration process is quite complicated and there is no obligation to register.*

**Keywords:** *Legal Protection, Geographical Indications, International Law, National Law, Balai Panjang Weaving.*